**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**TAHUN 2017**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DAFTAR ISI**

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
3. Dasar Hukum
4. Maksud dan Tujuan
5. Ruang Lingkup
6. Sekilas Tentang SPIP
7. Pengertian
8. Tujuan SPIP
9. Unsur-unsur SPIP
10. Lingkungan Pengendalian
11. Penilaian Resiko
12. Aktivitas Pengendalian
13. Informasi dan Komunikasi
14. Pemantauan Berkelanjutan
15. Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)*
16. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
17. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik
18. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
19. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
20. Risiko dan Kegiatan Pengendalian
21. Pernyataan Tujuan
22. Risiko-risiko
23. Pengendalian Terpasang
24. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
25. Informasi dan Komunikasi
26. Pemantauan dan Evaluasi
27. Penutup

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2017**

1. PENDAHULUAN
2. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat pentingnya Sistem Pengendalian Intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan wajib melakukan penilaian resiko.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Sumatera Barat;

4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 700-124-2017 tentang pembentukan satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat No.065/04/Sekre/III/2017 tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumate Barat.

1. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Koperasi UKM Prov. Sumbar. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi UKM Prov Sumbar. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

1. SEKILAS TENTANG SPIP
2. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengedalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

1. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengtahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu ”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d.Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat.

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Koperasi UKM untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

1. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggarakan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

1. Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

1. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
2. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera barat bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;

2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan

6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat; Seluruh lingkup Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat (4 Bidang, 1 UPTD dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang, UPTD dan Sekretariat pada Dinas koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Skor | Keterangan |
| 1. | 1 | Tidak Memadai |
| 2. | 2 | Kurang Memadai |
| 3. | 3 | Cukup Memadai |
| 4. | 4 | Memadai |

1. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Unsur** | **Kondisi** |
| 1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Kurang Memadai |
| 3. | Kepemimpinan yang Kondusif | Cukup Memadai |
| 4. | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Cukup Memadai |
| 5. | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat | Cukup Memadai |
| 6. | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | Cukup Memadai |
| 7. | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Cukup Memadai |
| 8. | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Cukup Memadai |

1. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Unsur** | **Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian** |
| I | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Menyusun kode etik Dinas Koperasi UKM yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. |
|  |  | Mensosialisasikan dan menandatangani Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dan memutakhirkannya secara rutin. |
|  |  | Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik. |
|  |  | Membuat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat |
| II | Komitmen terhadap Kompetensi | Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Koperasi UKM |
|  |  | Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya |
| III | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab | Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi UKM Prov Sumatera Barat |
|  |  | Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Koperasi UKM Prov Sumatera Barat |
|  |  | Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP |
| IV | Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia | Memberikan prioritas pengembangan SDM Aparatur Dinas Koperasi UKM untuk menunjang kegiatan |

1. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
2. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2017, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi,
2. Meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi serta usaha simpan pinjam dan UMKM dalam mengelola potensi ekonomi,
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi, UMKM
4. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas koperasi UKm Provinsi Sumatera Barat.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

* Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi
* Masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tentang koperasi
* Data koperasi belum akurat dan update
* Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan kinerja usaha koperasi
* Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan permodalan koperasi
* Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran dan standarisasi bagi UMKM
* Masih terbatasnya kompetensi pelaku usaha UMKM

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

* Masih rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan UMKM
* Pemupukan modal sendiri dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya belum optimal
* Masih rendahnya kualitas, produktifitas dan pemasaran produk koperasi dan UKM
* Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam pembinaan koperasi dan UMKM
* Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi UMKM
* Masih belum optimalnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

* Masih terbatasnya jumlah SDM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera barat
* Kurang berperannya SKPD dalam pelayanan pengaduan masyarakat atas program kegiatan yang dijalankan.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

1. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Berkualitas
2. Koordinasi dengan kab/kota baik secara lisan maupun tulisan
3. Rapat dengan tim penilai
4. Kegiatan Pembenahan Koperasi Tidak Aktif
5. Koordinasi dengan pendata mengenai data ODS/data koperasi tidak aktif yang valid
6. Melaksanakan sosialisasi di Kab/kota mengenai pembenahan koperasi tidak aktif
7. Membuat surat ke Kementrian koperasi permintaan data koperasi tidak aktiof yang akan dibubarkan
8. Kegiatan Pemasyarakatan Perkoperasian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat
9. Koordinasi dengan kab/kota untuk mengundang sosialisasi pemangku kepentingan
10. Menghadirkan narsumber yang berkompeten
11. Penyusunan jadwal pelaksanaan sosialisasi telah dikoordinasikan lebih awal dengan dinas Koperasi kab/kota
12. Kegiatan revitalisasi kelembagaan Koperasi
13. Bintek atau sosialisasi bagi koperasi tidak aktif
14. Koordinasi dengan Kab/Kota pelaksanaan dan peserta bintek
15. Rapat koordinasi dengan mengundang narasumber pusat dalam pembenahan koperasi tidak aktif
16. Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian diLokasi TMMD/N
17. Koordinasi dengan TNI mengenai jadwal Abri Masuk desa dan lokasi
18. Memberitahu dinas Kab/kota tentang pelaksanaan sosialisasi dilokasi TMMD/N dan menyiapkan peserta
19. Koordinasi dengan narasumber
20. Kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis.
21. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait
22. Kegiatan Pelatihan Bisnis Plan bagi Koperasi
23. Koordinasi dengan Kab/kota permintaan peserta
24. Mengundang narasumber yang berkompeten
25. Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi
26. Koordinasi dengan kab/Kota permintaan peserta
27. Mengundang narasumber yang berkompeten
28. Penyajian materi dan langsung dengan praktek
29. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Daya Saing Koperasi/KUD Sektor Pertanian
30. Koordinasi dengan Kab/kota permintaan peserta
31. Mengundang narasumber/pakar
32. Melakukan sinkronisasi program pemberdayaan usaha koperasi
33. Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian/KUD
34. Rapat koordinasi dengan kab/kota dengan mengundang narasumber pusat
35. Melakukan sinkronisasi program dengan Kab/kota
36. Peningkatan Usaha Ritel Koperasi
37. Rapat koordinasi dengan kab/kota dengan mengundang praktisi
38. Melakukan temu koperasi ritel/waserda ke prov DI Yogyakarta
39. Melakukan pembinaan ke kab/kota
40. Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pengelola Pasar dan Pengelola pasar rakyat
41. Rapat koordinasi dengan dinas kAb kota dan koperasi pengelola pasar rakyat
42. Koordinasi dengan kementrian koperasi dan ukm RI
43. Mengundang pakar/praktisi sebagai narasumber
44. Pengembangan Produk unggulan Daerah dengan pendekatan OVOP melalui Koperasi
45. Melakukan pembinaan ke daerah pengembangan PUD sesuai SK Gubernur Sumatera Barat
46. Melakukan rapat koordinasi dengan pendekatan OVOp mengundang narasumber pusat
47. Melaksanakan bintek pemasaran PUD secara online
48. Melaksanakan bintek pengembangan minyak atsiri
49. Melaksanakan temu koperasi dengan koperasi jawa tengah
50. Pembinaan koperasi sector riil menuju skala besar
51. Pengembangan Usaha Koperasi melalui Gemaskop
52. Melaksanakan jambore koperasi pemuda tingkat zsumbar
53. Mengikutsertakan PUD dlam pameran harkopnas expo
54. Melaksanakan bintek/sosialisasi gemaskop ditingkat provinsi
55. Peningkatan dan evaluasi permodalan koperasi
56. Sosialisasi gema nagari ke Kab/kota untuk menghimpun permodalan koperasi dari masyarakat maupun perantau
57. Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah
58. Melaksanakan bintek koperasi usaha simpan pinjam pola syariah
59. Pembinaan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi
60. Melaksanakan rapat koordinasi peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi
61. Melakukan pembinaan usaha simpan pinjam koperasi ke kab/kota
62. Pembinaan dan pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
63. Melaksanakan bintek pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dengan mendatangkan narasumber dari kemekop
64. Melaksanakan bintek koperasi unggulan usaha simpan pinjam
65. Melaksanakan uji petik ke koperasi simpan pinjam dan koperasi unggulan di Kab/kota
66. Pembinaan dan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi

1. melaksanakan pembinaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi ke kab/kota

1. Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran Merk dan sertifikasi halal
2. Meningkatkan pemahaman dan SDM UMKm tentang merk dan sertifikat halal dengan melakukan sosialisasi
3. Mendaftarkan merk UMKM
4. Menerbitkan sertifikasi halal produk UMKM
5. Pelatihan manajemen usaha bagi UMK Kawasan wisata
6. Melaksanakan pelatihan manajemen usaha bagi UMK dikawasan wisata
7. Pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM
8. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagio koperasi dan UMKM
9. Melaskanakan pelatihan pengembangan usaha dan pengolahan ikan air tawar bagi UMKm budidaya ikan
10. Peningkatan Gerakan terpadu pensejahteraan UMKM Sumatera Barat
11. Melaksanakan bintek usaha kecil dikawasan wisata
12. Partisipasi promosi produk UMKM
13. Mengikutsertakan UKM pameran inacraft dan pameran jogya
14. Menjalin kerjasama dengan pengrajin di Yogya
15. Penyusunan database UMKM makanan dan minuman unggulan Sumatera barat
16. Perkuatan produk UMKM
17. Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait
18. Melakukan sosialisasi di lokasi sentra
19. Kegiatan pengembangan UMKM Kerajinan Unggulan Sumatera Barat
20. Membuat buku data base kerajinan sumatera barat
21. Melakukan temu bisnis di Surabaya dan Malaysia untuk menjaring pemasaran produk UMKM
22. Melakukan sosialisasi/ bintek pengembangan manajemen bisnis bagi UMKM
23. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Organisasi Koperasi

* Evaluasi terhadap kinerja masing-masing bidang
* Komitmen kepala bidang dan kepala UPTD
* Membuat perjanjian dengan petugas pendata Kab/Kota untuk mengentri data koperasi ke system ODS
* Melakukan pembinaan dan pengawasan ke Koperasi
* Memberikan sanksi yang tegas kepada koperasi yang menjalankan usaha tidak sesuai AD

Tujuan 2: Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Daerah

* Evaluasi berjenjang dari masing-masing kepala bidang dalam pengembangan usaha UMKM
* Pendataan UKM skala besar dan kecil
* Menjaring kerjasama peningkatan usaha dan bisnis UMKM di Indonesia maupun mancanegara
* Melakukan promosi PUD melalui jaringan online

Tujuan 3: Terwujudnya Dinas Koperasi, UMKM yang berkinerja baik

* Melakukan koordinasi dengan Kepala bidang dan eselon IV dalam penyusun indicator kinerja
* Melakukan evaluasi terhadap pencapaian realisasi dan sasaran bidang secara priodik
* Melakukan monitoring ke daerah terhadap hasil pembinaan yang telah dilaksanakan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

1. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas koperasi UKM Provinsi Sumatera barat terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Kegiatan Sosialisasi/pelatihan/bintek

* Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll
* Intruksi dari pimpinan
* SOP pelaksanaan kegiatan
* Surat pernyataan komitmen
* Rapat rutin pencapaian program kegiatan
* SOP Pengawasan
* Surat pengusulan peserta diklat dan surat undangan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

1. **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas koperasi UKM Provinsi Sumatera barat sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan kepala Bidang maupun ka UPTD pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas koperasi UKM sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

* Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas koperasi UKM provinsi Sumatera barat
* Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat
* Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
* Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas koperasi UKM provinsi Sumatera Barat.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada lampiran 5

1. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh inspektorat provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan SKPD prov Sumatera Barat atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendari hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera barat melaksanakan tindak lanjutnya.

1. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Barat memberikan lapaoran atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat prov Sumatera barat. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada gubernur Sumatera Barat.

1. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Dinas koperasi UKm Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

**Lampiran 1**

**Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai** | **Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian** | **Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | **Penegakan Integritas dan Nilai Etika** | | | |
| 1 | Pengembangan Integritas dan Nilai Etika | Menyusun kode etik Dinas koperasi UKM yang mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan memutakhirkannya secara rutin |  |  |
| 2 | Pengkomunikasian nilai-nilai etika | Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan |  |  |
| 3 | Pengawasan terhadap penegakan integritas dan nilai etika | Mensosialisasikan dan menandatangai kode etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat secara rutin |  |  |
|  |  | Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran kode etik |  |  |
|  | Deviasi/Perbedaan dari nilai integriats dan nilai etika diidentifikasi tepat waktu sesuai tingkatan dalam organisasi | Pelanggar kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku |  |  |
|  |  | Menunjuk pejabat yang berkomperten dan independen untuk melakukan tindak lanjut atas pelanggaran kode etik |  |  |
| **II** | **Komitmen Terhadap Kopetensi** | | | |
| 1 | Identifikasi Kompetensi | Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya |  |  |
| 2 | Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi | Melaksanakan diklat/ pelatihan |  |  |
| **IV** | **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab** | | | |
| 1 | Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko | Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal |  |  |
| **V** | **Kebijakan Pengembangan SDM** | | | |
| 1 | Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci | Memberikan prioritas pengembangan SDM apparatur dinas koperasi UKM untuk menunjang kegiatan |  |  |

**Lampiran 2**

**DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Pemilik Risiko** | **Penyebab** | **Dampak Pada Capaian Tujuan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.** | | | | |
| 1 | Jika persyaratan teknis dan administrasi koperasi yang diusulkan tidak lengkap maka koperasi tidak dapat diusulkan sebagai koperasi berpretasi | Kasi Monev dan data | SOP penilaian koperasi berprestasi belum dipahami | terdapat koperasi yang tidak dapat diusulkan sebagai koperasi berprestasi |
| 2 | Keterlambatan dinas Kab/Kota mengusulkan koperasi berprestasi pada daerahnya dapat mengarahkan kepada tidak terlaksananya penilaian koperasi berprestasi | Kasi Monev dan data | Keterlambatan usulan dari dinas Kab/kota | tidak terlaksananya penilaian koperasi berprestasi |
| 3 | Tim Penilai Koperasi berprestasi dari berbagai bidang kesibukan masing-masing akan memperlambat penilaian | Kasi Monev dan data | Kesibukan tim penilai | tertundanya pelaksanaan penilaian |
| 4 | Keterlambatan pengusulan SK pemenang sehingga mengakibatkan keterlambatan pengumuman pemenang | Kasi Monev dan data | Keterlambatan Pengusulan SK | keterlambatan pengumuman pemenang |
| 5 | Ketidaksiapan daerah mengusulkan koperasi yang akan dinilai ditingkat provinsi dan nasional sesuai batas waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran kegiatan | Kasi Monev dan data | kurangnya SDM Pembina Kab/kota atau pergantian pembina | Ada beberapa kab/kota yang tidak mengikutsertakan koperasi untuk dinilai |
| **Tujuan 2 : Berkurangnya jumlah koperasi tidak aktif** | | | | |
| 1 | Kurangnya koordinasi dengan Kab/kota akan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan rapat pembenahan koperasi tidak aktif | Kasi kelembagaan | Kurangnya Koordinasi dengan kab/kota | tertundanya pelaksanaan rapat pembenahan koperasi tidak aktifdi kab/kota |
| 2 | Ketidakhadiran peserta rapat dapat menghambat pembenahan koperasi tidak aktif | Kasi kelembagaan | ketidak hadiran pengurus koperasi tidak aktif | bedah kasus terhadap koperasi tidak aktif tidak dapat dilaksanakan |
| 3 | Ketidakpastian data pembubaran koperasi dari kemetrian dapat menghambat pembinaan terhadap koperasi tidak aktif | Kasi kelembagaan | data pembubaran koperasi dari Kementrian belum pasti | menghambat pembinaan terhadap koperasin tidak aktif |
| **Tujuan 3 : Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan tentang perkoperasian** | | | | |
| 1 | Jika peserta yang hadir tidak dari pemangku kepentingan maka kegiatan tidak tepat sasaran | Kasi Perizinan | Lemahnya koordinasi Kab/kota | Peserta bukan dari pemangku kepentingan |
| 2 | Kab/Kota tidak berkoordinasi dengan MUI ataupun pemangku kepentingan sehingga dapat mengarahkan kepada tidak terlaksananya sosialisasi di kab/kota | Kasi Perizinan | Tidak koordinasi nya Kab/kota dengan pemangku kepentingan | Peserta sosialisasi bukan dari pemangku kepentingan sehingga pemangku kepentingan tidak paham perkoperasian |
| **Tujuan 4 : Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas** | | | | |
| 1 | Ketidakhadiran peserta rapat dapat menghambat pembenahan koperasi tidak aktif | Kasi Perizinan | Kurangnya koordinasi dengan kab/kota | Tidak terlaksananya sosialisasi sehingga koperasi berkualitas tidak bertambah |
| 2 | Materi yang disajikan belum disesuaikan dengan sasaran yang diharapkan akan mengakibatkan koperasi belum memiliki pengetahuan yang baik tentang proses peyusunan kelembagaan koperasi | Kasi Perizinan | narasumber yang kurang berkompeten | peserta sosialisasi tidak dapat meningkatkan kinerja koperasi |
| 3 | ketidaksiapan dinas kab/Kota pelaksanaan kegiatan didaerah akan menghambat terlaksananya kegiatan sesuai jadwal | Kasi Perizinan | Ketidaksiapan kab/kota sebagai penyelenggara sosialisasi | kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal |
| **Tujuan 5 : jumlah peserta sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N** | | | | |
| 1 | Penyesuaian jadwal dengan TMMD/N dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal | Kasi Perizinan | jadwal TMMD/N yang tidak pasti | tertundanya pelaksanaan kegiatan |
| 2 | ketidaksiapan kab/Kota pelaksanaan kegiatan didaerah akan menghambat terlaksananya kegiatan sesuai jadwal | Kasi Perizinan | Penundaan dan ketidaksiapan kab/kota menyiapkan peserta | tertundanya pelaksanaan perkoperasian dilokasi TMMD/N |
| **Tujuan 6** :**Jumlah Peserta Sosialisasi Bagi Kelompok Strategis** | | | | |
| 1 | Peserta tidak berasal dari kelompok strategis akan mengakibatkan sosialisasi tidak tepat sasaran | Kasi Perizinan | Kurangnya koordinasi dengan pemerintah Kab./kota | Sosialisasi tidak tepat sasaran |
| 2 | Penundaan jadwal sosialisasi dapat menghambat realisasi anggaran | Kasi Perizinan | Ketidaksiapan dinas kab./kota | Sosialisasi tidak berjalan sesuai jadwal |
| 3 | Tidak berperannya koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis akan menghalangi pencapaian program | Kasi Perizinan | Dinas Kab./Kota salah mengusulkan peserta sosialisasi | Kelompok straregis tidak dapat menjadi koperasi |
| 4 | Kurangnya dukungan dari instansi terkait akan menghambat pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok strategis | Kasi Perizinan | OPD terkait kurang mendukung karena legalitas usaha strategis sudah dikeluarkan oleh opd lain tidak perlu lagi koperasi | Kelompok strategis tidak bisa membentuk koperasi |
| **Tujuan 7 : Peserta mampu menyusun dan menerapkan bisnis plan bagi koperasi yang dikelolanya** | | | | |
| 1 | Peserta pelatihan tidak hadir akan mengakibatkan pelatihan tidak terlaksana sesuai sasara | Kasi penyelenggara | Kurangnya koordinasi dinas kab/kota dengan koperasi | Pelaksanaan pelatihan tidak tepat sasaran |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun bisnis plan bagi koperasi yang dikelolanya | Kasi penyelenggara | Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan narasumber | peserta tidak mampu menyusun bisnis plan koperasi yang dikelolanya |
| 3 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menerapkan bisnis plan pada koperasi yang dikelolannya | Kasi penyelenggara | narasumber tidak berasal dari praktisi yang berkompeten | Pelaksanaan pelatihan tidak efisien |
| **Tujuan 8 : Peserta mampu menerapkan sistem akuntansi dalam mengelola koperasi** | | | | |
| 1 | peserta pelatihan tidak memahami sistem akuntansi akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun laporan sesuai SAK ETAP | Kasi penyelenggara | Kurangnya pemahaman peserta tentang sistem akuntansi | peserta tidak mampu menerapkan sistem akuntansi dalam mengelola koperasi |
| **Tujuan 9 : Meningkatnya daya saing produk koperasi/KUD sektor pertanian** | | | | |
| 1 | Peserta bintek dan koordinasi tidak hadir akan mengakibatkan kegiatan tidak terealisasi |  | Kurangnya koordinasi dinas kab/kota dengan koperasi peserta | Kegiatan tidak dapat direalisasikan sesuai perencanaan |
| 2 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi |  | narasumber tidak berasal dari praktisi yang berkompeten | Pelaksanaan pelatihan tidak efisien |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi |  | Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan narasumber | peserta tidak mampu mmeningktkan daya saing produk koperasi |
| **Tujuan 10: Meningkatnya peran koperasi dalam sektor riil** | | | | |
| 1 | Peserta bintek dan koordinasi tidak hadir akan mengakibatkan koperasi tidak mampu melakukan revitalisasi usaha koperasi |  | Kurangnya koordinasi dinas kab/kota dengan koperasi peserta | koperasi tidak mampu melakukan revitalisasi usaha |
| 2 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi |  | narasumber tidak berasal dari praktisi yang berkompeten | Pelaksanaan pelatihan tidak efisien |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi |  | Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan narasumber | peserta tidak mampu melakukan revitalisasi usaha koperasi |
| **Tujuan 11 : Meningkatnya peranan waserda / ritail koperasi** | | | | |
| 1 | Peserta bintek dan koordinasi tidak hadir akan mengakibatkan koperasi tidak mampu melakukan revitalisasi usaha koperasi |  | Kurangnya koordinasi dinas kab/kota dengan koperasi peserta | koperasi tidak mampu melakukan revitalisasi usaha |
| 2 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi |  | narasumber tidak berasal dari praktisi yang berkompeten | Pelaksanaan pelatihan tidak efisien |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi |  | Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan narasumber | peserta tidak mampu melakukan revitalisasi usaha koperasi |
| **Tujuan 12 :Meningkatnya peranan koperasi pasar** | | | | |
| 1 | Peserta bintek/koordinasi tidak berasal dari koperasi pengelola pasar akan mengakibatkan kegiatan tidak tepat sasaran |  | Dinas Kab/kota tidak menyampaikan undangan ke Koperasi pasar | Koperasi pasar tidak dapat meningkatkan perannya |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi |  | Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan narasumber | peserta tidak mampu mmeningkatkan peranan koperasi pasar |
| **Tujuan 13 : Berkembangnya PUD dengan pendekatan OVOP melalui koperasi/pra Koperasi** | | | | |
| 1 | Bintek minyak asitri tidak diikuti oleh koperasi yang mengelola dapat mengakibatkan PUD daerah tidak berkembang |  | Kurangnya koordinasi dinas prov dengan dinas kab/kota | PUD tidak berkembang |
| 2 | narasumber praktisi pengembangan produk secara online kurang memahami IT akan mengakibatkan PUD tidak dapat dipasarkan secara online |  | narasumber bukan dari praktisi online | PUD tidak dapat dipasarkan secara online |
| 3 | Peserta bintek tidaka hadir akan menakibatkan sasaran pengembangan PUD melalui pendekatan OVOp tidak terlaksana sesuai target |  | kurangnya koordinasi dengan dinas Kab/kota | PUD tidak dapat dikembangkan sesuai dengan Pergub PUD |
|  | **Tujuan 14 : Meningkatnya peluang pasar produk unggulan UMKM dan mendorong terciptanya kader koperasi dikalangan generasi muda** | | | |
|  | Peserta pameran tidak diberitahu jauh hari akan mengakibatkan peserta pameran tidak menyiapkan produk untuk pameran secara maksimal |  | penentuan peserta pameran yang mendesak karena belum diterlambatan waktu pelaksanaan | kurangnya peluang pasar produk unggulan |
|  | Cuaca yang buruk akan mengakibatkan pelaksanaan jambore dikalangan generasi muda tertunda |  | kondisi alam yang tidak dapat diprediksi | Jambore dikalangan generasi muda dapat tertunda pelaksanaannya |
| **Tujuan 15 :Meningkatnya kemampuan koperasi pengelola bantuan permodalan** | | | | |
| 1 | masyarakat dan perantau kurang mendukung gema nagari akan mengakibatkan permodalan koperasi tidak bertambah |  | kurangnya dukungan dari masayarakat | koperasi tidak mampu menghimpun modal dari masyarakat |
| 2 | Ketidakhadiran peserta rapat dapat menghambat sosialisasi gema nagari |  | kurangnya koordinasi kab/kota dengan provinsi dalam sosialisasi gema nagari | gema nagari di kab/kota tidak terlaksanan sehingga koperasi tidak mampu menghimpun dana dari masyarakat/perantau |
| **Tujuan 16 : Meningkatnya peran usaha simpan pinjam pola syariah** | | | | |
| 1 | Ketidakhadiran peserta bintek/sosialisasi akan mengakibatkan kegiatan tidak terlaksanan sesuai sasaran |  | Dinas Provinsi kurang koordinasi dengan dinas Kab/kota | Koperasi pengelola usaha simpan pinjam pola syariah tidak mampu meningkatkan perannya |
| 2 | peserta tidak berasal dari koperasi pengelola usaha simpan pinjam pola syariah akan mengakibatkan bintek tidak tepat sasaran |  | Dinas Provinsi kurang koordinasi dengan dinas Kab/kota | Koperasi pengelola usaha simpan pinjam pola syariah tidak mampu meningkatkan perannya |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan peran usaha simpan pinjam pola syariah |  | kurangnya koordinasi dengan narasumber | Koperasi tidak ammpu meningkatkan perananannya |
| **Tujuan 17 : Jumlah usaha simpan pinjam yang dibina** | | | | |
| 1 | Ketidakhadiran peserta bintek/sosialisasi akan mengakibatkan kegiatan tidak terlaksanan sesuai sasaran |  | Dinas Provinsi kurang koordinasi dengan dinas Kab/kota | tidak bertambahnya jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang dibina |
| **Tujuan 18 :Meningkatnya jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang mendapat pengawasan** | | | | |
| 1 | Pengurus koperasi tidak melaksanakan pembukuan keuangan dan inventaris secara baik dapat mengarahkan kepada penyelewengan dana koperasi | kasi pemeriksaan dan pengawasan | pengurus tidak memahami sistem pembukuan/akuntansi | pemeberhentian pengurus |
| 2 | Pengurus tidak dapat menunjukkana anggaran dasar akan mengakibatkan satgas pengawas tidak dapat memeriksa legalitas dan kepatuhan koperasi | kasi pemeriksaan dan pengawasan | hilangnya AD karena bencana alam atau masih ditangan pengurus yang lama | Usaha simpan pinjam koperasi yang di ujipetikkan tidak dapat diketahui aspek kepatuhannya terhadap AD |
| 3 | materi yang diberikan narasumber tidak dipaparkan dan disajikan semenarik mungkin akan mengakibatkan peserta kurang memahami prosedur pengawasan |  | Ketidakmampuan narasumber dalam menyajikan materi | tidak siapnya dinas kab/kota melakukan tindak lanjut hasil pengawasan satgas provinsi |
| 4 | Satgas pengawasan belum memahami permen pengawasan akan mengakibatkan | kasi pemeriksaan dan pengawasan | pengawasan merupakan bidang baru dan memiliki aturan yang baru |  |
| **Tujuan 19 : Meningkatnya jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya oleh aparatur** | | | | |
| 1 | Dinas Koperasi kab/kota tidak memiliki SDM yang kompeten akan mengakibatkan aparatur tidak mampu menilai kesehatan usaha simpan pinjam koperasi | kasi penkes | Seringnya pergantian jabatan di kab/kota | Aparatur tidak mampu menilai kesehatan simpan pinjam |
| **Tujuan 20: Meningkatnya pemahaman dan SDM UMKM tentang Merk dan Sertifikasi Halal, terdaftarnya merk 90 UKM dan Terbitnya sertifikasi halal 10 UKM** | | | | |
| 1 | Kelalaian UKM untuk melengkapi persyaratan pendaftaran merk dan halal akan memperlambat keluarnya sertifikasi dan merk halal UMKM | Kasi P3 | Kelalaian UKM melengkapi persyaratan | lambatnya sertifikasi merk dan halal produk UMKM |
| 2 | lambatnya hasil audit dari LPP POM MUIakan mengakibatkan terlambat keluarnya sertifikat halal |  | Hasil audit LPP POM yang terlambat | tidak terdaftarnya halal produk UMKM |
| 3 | Panjangnya prosedur akanm mengakibatkan lamanya keluarnya merk |  | Prosedur pendaftaran merk dan halal yang panjang | Sertifikasi merk dan halal produk UMKM lama keluarnya dari dirjen Haki dan Mui |
| 4 | Keterbatasan anggota LPP POM akan mengakibatkan terlambatnya keluarnya sertifikasi halal |  | Jumlah anggota LPP POM yang sedikit | Sertifikasi halal produk UMKM lambat keluarnya |
| **Tujuan 21 :peserta mampu menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya** | | | | |
| 1 | Peserta pelatihan tidak hadir akan mengakibatkan pelatihan tidak terlaksana sesuai sasara | Kasi penyelenggara | Kurangnya koordinasi dinas kab/kota dengan koperasi | Pelaksanaan pelatihan tidak tepat sasaran |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun manajemen usaha bagi koperasi yang dikelolanya |  | Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan narasumber | peserta tidak mampu mengembangkan manajemen usaha |
| 3 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu mengembangkan manajemen usahapada koperasi yang dikelolannya |  | narasumber tidak berasal dari praktisi yang berkompeten | Pelaksanaan pelatihan tidak efisien |
| **Tujun 22 Meningkatnya pemahaman koperasi dan UMKM tentang kewirausahaan dan Peserta mampu mengembangkan usaha dan pengolahan ikan air tawar** | | | | |
| 1 | Peserta pelatihan tidak hadir akan mengakibatkan pelatihan tidak terlaksana sesuai sasara | Kasi penyelenggara | Kurangnya koordinasi dinas kab/kota dengan koperasi | Pelaksanaan pelatihan tidak tepat sasaran |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun manajemen usaha bagi koperasi yang dikelolanya |  | Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan narasumber | peserta tidak mampu mengembangkan manajemen usaha |
| 3 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu mengembangkan manajemen usahapada koperasi yang dikelolannya |  | narasumber tidak berasal dari praktisi yang berkompeten | Pelaksanaan pelatihan tidak efisien |
| **Tujuan 23 :Meningkatnya usaha kecil dilokasi wisata** | | | | |
| 1 | Kegiatan sifatnya terpadu akan mengakibtakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan | Kasi Peningkatan Kewirausahaan | kurangnya koordinasi dengan OPD lain | usaha kecil dilokasi wisata tidak berkembang |
| **Tujuan 24: Meningkatnya pemasaran produk UMKM** | | | | |
| 1 | Tenda tempat Pameran tidak Optimal di Kunjungi Pengunjung akan mengakibatkan UKM tidak ada jual beli/omset | Kasi fasilitasi Usaha Kecil | Kurangnya promosi | Produk UMKM tidak banyak diminati oleh masyarakat |
| 2 | Kurangnya promosi akan mengakibatkan Masyarakat kurang mengetahui adanya Pameran |  | Kurangnya promosi | Bazar UKM tidak banyak dikunjungi oleh masyarakat sehingga produk UMKM tidak banyak diminati pasar |
| **Tujuan 25 : Terdatanya UMKM makanan dan minuman Sumbar** | | | | |
| 1 | Ketidaktersediaan data UKM Makanan dan minuman di kab/kota akan mengakibatkan lambatnya penyusunan buku database makanan dan minuman unggulan Sumbar | Kasi P3 | Kab/Kota tidak memiliki data produk makanan dan minuman di daerah masing -masing | Produk makanan dan minuman unggulan UMKM Sumbar tidak terdata secara maksimal |
| **Tujuan 26 : Meningkatnya usaha UMKM Sentra** | | | | |
| 1 | Penyusunan profil UMKM ke Kab/kota memakan waktu yang lama dapat menghambat pelaksanaan kegiatan | kasi P3 | Petugas harus mendatangai UKM di kab/kota dan membutuhkan waktu yang lama | data UMKM makanan dan minuman tidak dapat disajikan tepat waktu |
| 2 | Pendesaianan dan packing Asn dipihakketigakan dan dikoordinasikan dengan UMKM baru dicetak sehingga dapat mengakibtakab |  | Ketiadaan SDM di dinas yang mampu mendesain dan packing | produk UMKM dijual tanpa packing yang bagus sehingga kalah bersaing dipasaran |
| **Tujuan 27 :Meningkatnya usaha UMK Sentra rendang, kerupuk ubi, batok kelapa, rajutan, tenun dan songket** | | | | |
| 1 | Materi yang disajikan belum disesuaikan dengan sasaran yang diharapkan akan mengakibatkan umk sentra belum memiliki pengetahuan yang baik tentang proses peyusunan kelembagaan | kasi P3 | kurangnya koordinasi dengan narasumber | Peserta tidak mampu meningkatkan usaha dilokasi sentra |
| 2 | Lokasi peserta yang jauh dari tempat sosialisasi akan mengakibatkan pelaksanaan sosialisasi tidak tepat sasaran |  |  |  |
| **Tujuan 28 :Terjadinya mitra produk kerajinan unggulan Sumbar di Surabaya dan Malaysia, serta meningkatnya SDM UMKM Pengrajin tentang manajemen bisnis** | | | | |
| 1 | Ukm yang ikut pameran tidak menyiapkan produk unggulan secara maksimal akan mengakibatkan tidak terjalinnya mitra usaha dengan kerajinan unggulan di surabaya dan malaysia | Kasi P3 | keterlambatan pemberitahuan jadwal kepada UKM peserta pameran | produk umkm tidak dapat bersaing dipasaran |
| **Tujuan 29 :tersedianya laporan capaian kinerja SKPD** | | | | |
| 1 | Terlambatnya penyampaian capaian indikator kinerja dari bidang dapat mengakibatakan terlambatnya penyusunan LAKIP | Subag Program | Bidang lambat penyampaikan laporan indikator kinerja | Terlambatnya penyampaian capaian indikator kinerja dari bidangmenyebabkan terlambatnya penyampaian laporan kinerja |
| 2 | Terlambtanya penyampaian data dari Kab/kota dapat mengakibatkan keterlambatan dalam openghitungan capaian indikator | Subag Program | kab/kota terlambat menyampaikan data | Terlambatnya perhitungan capaian indikator menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan kinerja |
| **Tujuan 30 :tercapainya penyusunan pelaporan kinerja keuangan** | | | | |
| 1 | errornya sistem SIPKD dapat menghambat kinerja keuangan | Subag Keu | Sistem error | penyusunan laporan tidak tepat waktu |
| 2 | Perubahan Peraturan akan mengakibatkan keterlambatan realisasi anggaran | Subag Keu | Perubahan aturan keuangan | penyusunan laporan tidak tepat waktu |
| 3 | Asn dalam merealisasikan anggaran tidak berpedoman pada DPA dan standar biaya dapat mengarahkan kepada kerugian negara (contra post) | Subag Keu | Verifikasi dikeuangan tidak berfungsi | Laporan capaian kinerja keuangan tidak disajikan secara akuntabel |
| **Tujuan 31 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan data SKPD** | | | | |
| 1 | ASN dalam menyusun anggaran tidak berpedoman pada standar biaya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan | Subag Program | Asn tidak berpedoman pada SBU | Terdapatnya silpa anggaran diakhir tahun anggaran atau anggaran tidak dapat direalisasikan |
| 2 | Ketidaktepatan perencanaan penganggaran menyebabkan tertundanya pelaksanaan anggaran | Subag Program | Ketidaktepatan nomor rekening dan kemampuan SDm dalam menyusun anggaran | Anggaran yang direncanakan tidak dapat direalisasikan |
| 3 | Petugas pendata dalam menginput data koperasi ke sistem ODS tidak sesuai riil dapat mengakibatkan laporan pendataan koperasi tidak valid | kasi monev data | Ketidaksesuaian petugas pendata menginput data ke sistem ODS | data Koperasi dan UKM disajikan tidak valid |
| 4 | Data yang didapat dari petugas pendata tidak dikoreksi oleh pembina Kab/kota dapat mengakibatkan tidak terpantaunya bertambah/berkurangnya pertumbuhan koperasi | kasi monev data | Pembina Kab/Kota tidak mengkoreksi data yang dihasilkan oleh petugas pendata | data koperasi yang tersedia belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembinaan koperasi |

**Lampiran 3**

**Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian** | | | | | **Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan** | **Target waktu penyelesaian** |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 |
| **Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Koperasi** | | | | | | | | |
| 1 | Jika persyaratan teknis dan administrasi koperasi yang diusulkan tidak lengkap maka koperasi tidak dapat diusulkan sebagai koperasi berpretasi | Evaluasi berjenjang dari masing-masing tim | | | | | Kasi Monev dan data | Mei 2017 |
| 2 | Keterlambatan dinas Kab/Kota mengusulkan koperasi berprestasi pada daerahnya dapat mengarahkan kepada tidak terlaksananya penilaian koperasi berprestasi | Koordinasi dengan Dinas Kab/Kota | | | | | Kasi Monev dan data | Mei 2017 |
| 3 | Tim Penilai Koperasi berprestasi dari berbagai bidang kesibukan masing-masing akan memperlambat penilaian | Evaluasi berjenjang dari kabid dengan masing-masing tim | | | | | Kasi Monev dan data | Mei 2017 |
| 4 | Keterlambatan pengusulan SK pemenang sehingga mengakibatkan keterlambatan pengumuman pemenang | Teguran dari kabid atau pimpinan | | | | | Kasi Monev dan data | Mei 2017 |
| 5 | Ketidaksiapan daerah mengusulkan koperasi yang akan dinilai ditingkat provinsi dan nasional sesuai batas waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran kegiatan | koordinasi dengan Kab/kota | | | | | Kasi Monev dan data | Mei 2017 |
| **Tujuan 2 : Berkurangnya jumlah koperasi tidak aktif** | | | | | | | | |
| 1 | Kurangnya koordinasi dengan Kab/kota akan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan rapat pembenahan koperasi tidak aktif | Evaluasi berjenjang dari kabid dengan masing-masing tim | | | | | Kasi kelembagaan | 7hari |
| 2 | Ketidakhadiran peserta rapat dapat menghambat pembenahan koperasi tidak aktif | Buku pedoman | | | | | Kasi kelembagaan | 7 hari |
| 3 | Ketidakpastian data pembubaran koperasi dari kemetrian dapat menghambat pembinaan terhadap koperasi tidak aktif | Surat ke kementrian permintaan data | | | | | Kasi kelembagaan | per bulan |
| **Tujuan 3 : Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan tentang perkoperasian** | | | | | | | | |
| 1 | Jika peserta yang hadir tidak dari pemangku kepentingan maka kegiatan tidak tepat sasaran | evaluasi berjenjang ke masing-masing dinas kab/kota | | | | | Kasi Perizinan |  |
| 2 | Kab/Kota tidak berkoordinasi dengan MUI ataupun pemangku kepentingan sehingga dapat mengarahkan kepada tidak terlaksananya sosialisasi di kab/kota | koordinasi dengan dinas kab/kota atau evaluasi berjenjang | | | | | Kasi Perizinan |  |
| **Tujuan 4 : Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas** | | | | | | | | |
| 1 | Ketidakhadiran peserta rapat dapat menghambat pembenahan koperasi tidak aktif | koordinasi dengan dinas kab/kota atau evaluasi berjenjang | | | | | Kasi Perizinan |  |
| 2 | Materi yang disajikan belum disesuaikan dengan sasaran yang diharapkan akan mengakibatkan koperasi belum memiliki pengetahuan yang baik tentang proses peyusunan kelembagaan koperasi | Petunjuk teknis dan buku pedoman | | | | | Kasi Perizinan |  |
| 3 | ketidaksiapan dinas kab/Kota pelaksanaan kegiatan didaerah akan menghambat terlaksananya kegiatan sesuai jadwal | Surat ke kab/Kota batas waktu pelaksanaan keg | | | | | Kasi Perizinan |  |
| **Tujuan 5 : jumlah peserta sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N** | | | | | | | | |
| 1 | Penyesuaian jadwal dengan TMMD/N dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal | Koordinasi dengan TNI dan memorandum | | | | Kasi Perizinan | |  |
| 2 | ketidaksiapan kab/Kota pelaksanaan kegiatan didaerah akan menghambat terlaksananya kegiatan sesuai jadwal | Surat edaran dan instruksi pimpinan | | | | Kasi Perizinan | |  |
| **Tujuan 6** :**Jumlah Peserta Sosialisasi Bagi Kelompok Strategis** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta tidak berasal dari kelompok strategis akan mengakibatkan sosialisasi tidak tepat sasaran | Surat edaran dan instruksi pimpinan | | | Kasi Perizinan | | |  |
| 2 | Penundaan jadwal sosialisasi dapat menghambat realisasi anggaran | Surat edaran dan instruksi pimpinan | | | Kasi Perizinan | | |  |
| 3 | Tidak berperannya koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis akan menghalangi pencapaian program | Instruksi pimpinan | | | Kasi Perizinan | | |  |
| 4 | Kurangnya dukungan dari instansi terkait akan menghambat pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok strategis | Koordinasi dengan OPD lain | | | Kasi Perizinan | | |  |
| **Tujuan 7 : Peserta mampu menyusun dan menerapkan bisnis plan bagi koperasi yang dikelolanya** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta pelatihan tidak hadir akan mengakibatkan pelatihan tidak terlaksana sesuai sasara | Instruksi pimpinan | | | Kasi Penyelenggara | | |  |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun bisnis plan bagi koperasi yang dikelolanya | Buku pedoman | | | Kasi Penyelenggara | | |  |
| 3 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menerapkan bisnis plan pada koperasi yang dikelolannya | Petunjuk teknis | | | Kasi Penyelenggara | | |  |
| **Tujuan 8 : Peserta mampu menerapkan sistem akuntansi dalam mengelola koperasi** | | | | | | | | |
| 1 | peserta pelatihan tidak memahami sistem akuntansi akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun laporan sesuai SAK ETAP | Petunjuk teknis dan buku pedoman | | | Kasi Penyelenggara | | |  |
| **Tujuan 9 : Meningkatnya daya saing produk koperasi/KUD sektor pertanian** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta bintek dan koordinasi tidak hadir akan mengakibatkan kegiatan tidak terealisasi | Instruksi pimpinan | | | Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi | | |  |
| 2 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi | Instruksi pimpinan | | |  | | |  |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi | Instruksi pimpinan | | |  | | |  |
| **Tujuan 10: Meningkatnya peran koperasi dalam sektor riil** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta bintek dan koordinasi tidak hadir akan mengakibatkan koperasi tidak mampu melakukan revitalisasi usaha koperasi | Instruksi pimpinan | | | Kasi fasilitasi Usaha Koperasi | | |  |
| 2 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi | Instruksi pimpinan | | |  | | |  |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi | Instruksi pimpinan | | |  | | |  |
| **Tujuan 11 : Meningkatnya peranan waserda / ritail koperasi** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta bintek dan koordinasi tidak hadir akan mengakibatkan koperasi tidak mampu melakukan revitalisasi usaha koperasi | Instruksi pimpinan | | | Kasi fasilitasi Usaha Koperasi | | |  |
| 2 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi | Instruksi pimpinan | | |  | | |  |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi | arahan lisan dan petunjuk teknis | | |  | | |  |
| **Tujuan 12 :Meningkatnya peranan koperasi pasar** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta bintek/koordinasi tidak berasal dari koperasi pengelola pasar akan mengakibatkan kegiatan tidak tepat sasaran | Instruksi pimpinan | | | Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi | | |  |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan daya saing koperasi | Petunjuk teknis dan arahan lisan | | |  | | |  |
| **Tujuan 13 : Berkembangnya PUD dengan pendekatan OVOP melalui koperasi/pra Koperasi** | | | | | | | | |
| 1 | Bintek minyak asitri tidak diikuti oleh koperasi yang mengelola dapat mengakibatkan PUD daerah tidak berkembang | Komitmen kepala daerah | | | Kasi fasilitasi Usaha Koperasi | | |  |
| 2 | narasumber praktisi pengembangan produk secara online kurang memahami IT akan mengakibatkan PUD tidak dapat dipasarkan secara online | Koordinasi dengan narasumber | | |  | | |  |
| 3 | Peserta bintek tidaka hadir akan menakibatkan sasaran pengembangan PUD melalui pendekatan OVOp tidak terlaksana sesuai target | Komitmen dinas Kab/Kota | | |  | | |  |
|  | **Tujuan 14 : Meningkatnya peluang pasar produk unggulan UMKM dan mendorong terciptanya kader koperasi dikalangan generasi muda** | | | | | | | |
|  | Peserta pameran tidak diberitahu jauh hari akan mengakibatkan peserta pameran tidak menyiapkan produk untuk pameran secara maksimal | Komitmen dengan penyelenggara | | | Kasi fasilitasi Usaha Koperasi | | |  |
|  | Cuaca yang buruk akan mengakibatkan pelaksanaan jambore dikalangan generasi muda tertunda |  | | |  | | |  |
| **Tujuan 15 :Meningkatnya kemampuan koperasi pengelola bantuan permodalan** | | | | | | | | |
| 1 | masyarakat dan perantau kurang mendukung gema nagari akan mengakibatkan permodalan koperasi tidak bertambah | Komitmen kepala daerah | | | Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan koperasi | | |  |
| 2 | Ketidakhadiran peserta rapat dapat menghambat sosialisasi gema nagari | Komitmen kepala daerah dan kepala SKPD | | |  | | |  |
| **Tujuan 16 : Meningkatnya peran usaha simpan pinjam pola syariah** | | | | | | | | |
| 1 | Ketidakhadiran peserta bintek/sosialisasi akan mengakibatkan kegiatan tidak terlaksanan sesuai sasaran | Komitmen dan koordinasi dengan kabid terkait | | | Kasi fasilitasi Usaha Koperasi | | |  |
| 2 | peserta tidak berasal dari koperasi pengelola usaha simpan pinjam pola syariah akan mengakibatkan bintek tidak tepat sasaran | Koordinasi SKPD dengan dinas Kab Kota dan Koperasi | | |  | | |  |
| 3 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu meningkatkan peran usaha simpan pinjam pola syariah | Koordinasi dengan narasumber | | |  | | |  |
| **Tujuan 17 : Jumlah usaha simpan pinjam yang dibina** | | | | | | | | |
| 1 | Ketidakhadiran peserta bintek/sosialisasi akan mengakibatkan kegiatan tidak terlaksanan sesuai sasaran | Komitmen kepala daerah dan kepala SKPD | | | Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan koperasi | | |  |
| **Tujuan 18 :Meningkatnya jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang mendapat pengawasan** | | | | | | | | |
| 1 | Pengurus koperasi tidak melaksanakan pembukuan keuangan dan inventaris secara baik dapat mengarahkan kepada penyelewengan dana koperasi | Teguran dan Sanksi tidak boleh menjalankan fungsi' | | | kasi pemeriksaan dan pengawasan | | |  |
| 2 | Pengurus tidak dapat menunjukkana anggaran dasar akan mengakibatkan satgas pengawas tidak dapat memeriksa legalitas dan kepatuhan koperasi | Teguran dan Sanksi tidak boleh menjalankan fungsi' | | |  | | |  |
| 3 | materi yang diberikan narasumber tidak dipaparkan dan disajikan semenarik mungkin akan mengakibatkan peserta kurang memahami prosedur pengawasan | Koordinasi dengan narasumber | | |  | | |  |
| 4 | Satgas pengawasan belum memahami permen pengawasan akan mengakibatkan | Koordinasi dan bintek dengan narasumber dr pusat | | |  | | |  |
| **Tujuan 19 : Meningkatnya jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya oleh aparatur** | | | | | | | | |
| 1 | Dinas Koperasi kab/kota tidak memiliki SDM yang kompeten akan mengakibatkan aparatur tidak mampu menilai kesehatan usaha simpan pinjam koperasi | Komitmen pimpinan daerah | | | kasi Penkes | | |  |
| **Tujuan 20: Meningkatnya pemahaman dan SDM UMKM tentang Merk dan Sertifikasi Halal, terdaftarnya merk 90 UKM dan Terbitnya sertifikasi halal 10 UKM** | | | | | | | | |
| 1 | Kelalaian UKM untuk melengkapi persyaratan pendaftaran merk dan halal akan memperlambat keluarnya sertifikasi dan merk halal UMKM | petunjuk teknis syarat pengajuan merk dan halal | | | Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan usaha Kecil | | |  |
| 2 | lambatnya hasil audit dari LPP POM MUIakan mengakibatkan terlambat keluarnya sertifikat halal | Mou dengan LPP POM | | |  | | |  |
| 3 | Panjangnya prosedur akanm mengakibatkan lamanya keluarnya merk | Mou dengan haki | | |  | | |  |
| 4 | Keterbatasan anggota LPP POM akan mengakibatkan terlambatnya keluarnya sertifikasi halal | Mou dengan LPP POM | | |  | | |  |
| **Tujuan 21 :peserta mampu menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta pelatihan tidak hadir akan mengakibatkan pelatihan tidak terlaksana sesuai sasara | komitmen dengan Dinas Kab/Kota | | | Kasi Penyelenggara | | |  |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun manajemen usaha bagi koperasi yang dikelolanya | koordinasi dengan Narsumber | | |  | | |  |
| 3 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu mengembangkan manajemen usahapada koperasi yang dikelolannya | evaluasi terhadap kinerja kasi' | | |  | | |  |
| **Tujun 22 Meningkatnya pemahaman koperasi dan UMKM tentang kewirausahaan dan Peserta mampu mengembangkan usaha dan pengolahan ikan air tawar** | | | | | | | | |
| 1 | Peserta pelatihan tidak hadir akan mengakibatkan pelatihan tidak terlaksana sesuai sasara | evaluasi terhadap kinerja kasi' | | | Kasi Penyelenggara | | |  |
| 2 | materi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu menyusun manajemen usaha bagi koperasi yang dikelolanya | komitmen dan koordinasi dengan narasumber | | |  | | |  |
| 3 | narasumber bukan dari praktisi yang berkompeten sehingga akan mengakibatkan peserta tidak mampu mengembangkan manajemen usahapada koperasi yang dikelolannya | evaluasi kinerja kasi | | |  | | |  |
| **Tujuan 23 :Meningkatnya usaha kecil dilokasi wisata** | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan sifatnya terpadu akan mengakibtakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan | Koordinasi dengan SKPD terkait dan komitmen kepala daerah | | | Kasi Peningkatan Kewirausahaan | | |  |
| **Tujuan 24: Meningkatnya pemasaran produk UMKM** | | | | | | | | |
| 1 | Tenda tempat Pameran tidak Optimal di Kunjungi Pengunjung akan mengakibatkan UKM tidak ada jual beli/omset | | evaluasi berjenjang masing masing tim | | Kasi fasilitasi Usaha Kecil | | |  |
| 2 | Kurangnya promosi akan mengakibatkan Masyarakat kurang mengetahui adanya Pameran | | evaluasi berjenjang masing masing tim | | Kasi fasilitasi Usaha Kecil | | |  |
| **Tujuan 25 : Terdatanya UMKM makanan dan minuman Sumbar** | | | | | | | | |
| 1 | Ketidaktersediaan data UKM Makanan dan minuman di kab/kota akan mengakibatkan lambatnya penyusunan buku database makanan dan minuman unggulan Sumbar | | komitmen kepala daerah | | Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan usaha Kecil | | |  |
| **Tujuan 26 : Meningkatnya usaha UMKM Sentra** | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan profil UMKM ke Kab/kota memakan waktu yang lama dapat menghambat pelaksanaan kegiatan | | komitmen kepala daerah | Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan usaha Kecil | | | |  |
| 2 | Pendesaianan dan packing Asn dipihakketigakan dan dikoordinasikan dengan UMKM baru dicetak sehingga dapat mengakibtakab | | komitmen kepala dinas dengan kabid |  | | | |  |
| **Tujuan 27 :Meningkatnya usaha UMK Sentra rendang, kerupuk ubi, batok kelapa, rajutan, tenun dan songket** | | | | | | | | |
| 1 | Materi yang disajikan belum disesuaikan dengan sasaran yang diharapkan akan mengakibatkan umk sentra belum memiliki pengetahuan yang baik tentang proses peyusunan kelembagaan | | koordinasi dengan narasumber | Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan usaha Kecil | | | |  |
| 2 | Lokasi peserta yang jauh dari tempat sosialisasi akan mengakibatkan pelaksanaan sosialisasi tidak tepat sasaran | | komitmen dari kepala dinas kab/kota |  | | | |  |
| **Tujuan 28 :Terjadinya mitra produk kerajinan unggulan Sumbar di Surabaya dan Malaysia, serta meningkatnya SDM UMKM Pengrajin tentang manajemen bisnis** | | | | | | | | |
| 1 | Ukm yang ikut pameran tidak menyiapkan produk unggulan secara maksimal akan mengakibatkan tidak terjalinnya mitra usaha dengan kerajinan unggulan di surabaya dan malaysia | | komitmen dan kerjasama dengan UKM | Kasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan usaha Kecil | | | |  |
| **Tujuan 29 :tersedianya laporan capaian kinerja SKPD** | | | | | | | | |
| 1 | Terlambatnya penyampaian capaian indikator kinerja dari bidang dapat mengakibatakan terlambatnya penyusunan LAKIP | | evaluasi terhadap kinerja masing masing bidang | Subag Program | | | |  |
| 2 | Terlambtanya penyampaian data dari Kab/kota dapat mengakibatkan keterlambatan dalam openghitungan capaian indikator | | evaluasi terhadap kinerja masing masing bidang | Subag Program | | | |  |
| **Tujuan 30 :tercapainya penyusunan pelaporan kinerja keuangan** | | | | | | | | |
| 1 | errornya sistem SIPKD dapat menghambat kinerja keuangan | | Koordinasi dengan bakeuda | Subag Keu | | | |  |
| 2 | Perubahan Peraturan akan mengakibatkan keterlambatan realisasi anggaran | | evaluasi bertahap dengan bakeuda | Subag Keu | | | |  |
| 3 | Asn dalam merealisasikan anggaran tidak berpedoman pada DPA dan standar biaya dapat mengarahkan kepada kerugian negara (contra post) | | tindak lanjut oleh insp | Subag Keu | | | |  |
| **Tujuan 31 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan data SKPD** | | | | | | | | |
| 1 | ASN dalam menyusun anggaran tidak berpedoman pada standar biaya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan | | Evaluasi berjenjang | Subag Program | | | |  |
| 2 | Ketidaktepatan perencanaan penganggaran menyebabkan tertundanya pelaksanaan anggaran | | Evaluasi bertahap | Subag Program | | | |  |
| 3 | Petugas pendata dalam menginput data koperasi ke sistem ODS tidak sesuai riil dapat mengakibatkan laporan pendataan koperasi tidak valid | | komitmen dari kepala dinas kab/kota dan petugas pendata | kasi monev data | | | |  |
| 4 | Data yang didapat dari petugas pendata tidak dikoreksi oleh pembina Kab/kota dapat mengakibatkan tidak terpantaunya bertambah/berkurangnya pertumbuhan koperasi | | Komitmen dari kepala dinas Kab/kota menyajikan lap data secara benar | kasi monev data | | | |  |

**Lampiran 4**

**Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Pengandalian yang direncanakan** | **Media/Bentuk/Sarana/Pengomunikasikan** | **Penyedia Informasi** | **Penerima Informasi** | **Waktu Pelaksanaan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Meningkatnya Kualitas Koperasi** | Evaluasi berjenjang dari masing-masing tim | Rapat Bulanan, bahan expost, laptop, infokus, dll | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Seluruh tim dan Dinas Koperasi UKM Sumatera barat |  |
|  |  | Koordinasi dengan Dinas Kab/Kota | surat pemberitahuan | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Seluruh Dinas Koperasi UKM Sumatera barat |  |
|  |  | Evaluasi berjenjang dari kabid dengan masing-masing tim | Rapat dan Notulen Rapat | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Seluruh Tim |  |
|  |  | Teguran dari kabid atau pimpinan | Rapat dan Notulen rapat | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Kasi monev |  |
|  |  | Koordinasi dengan Kab/Kota | Telpon, fax | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Seluruh Dinas Koperasi UKM Sumatera barat |  |
| 2 | Berkurangnya Jumlah Koperasi Tidak Aktif | Evaluasi berjenjang dari kabid dengan masing-masing Tim | Undangan, Telpon, Fax | Bidang Perizinan dan kelembagaan, | Dinas kab/Kota |  |
|  |  | Buku Pedoman | Surat pemberitahuan, SOP dan buku pedoman | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas kab/Kota |  |
|  |  | Surat Ke Kementrian koperasi | Surat tertulis/Lisan Ke Kemenkop | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Kementrian Koperasi |  |
| 3 | Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap perkoperasian | Evaluasi berjenjang ke masing masing dinas Kab/Kota | Surat pengusulan peserta diklat dan surat undangan, | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas kab kota untuk megoreksiseluruh peserta |  |
|  |  | evaluasi berjenjang | Rapat dan Notulen dengan tim Prov dan Telp/Surat ke Kab/Kota | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas kab/Kota |  |
| 4 | Meningkatnya Jumlah koperasi berkualitas | Koordinasi dengan kab/Kota atau evaluasi berjenjang | Surat pengusulan Tim dan surat pemberitahuan serta permintaan data kepada dinas Kab/Kota | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas Kab/kota dan koperasi |  |
|  |  | Petunjuk teknis dan buku pedoman | Telpon dan surat tertulis ke narasumber ttg tujuan sosialisasi | Bidang Perizinan dan kelembagaan | narasumber |  |
|  |  | Surat ke Kab/kota | Surat pengusulan pelaksanaan sosialisasi di kab/kota | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas Kab/kota dan koperasi |  |
| 5 | Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N | Koordinasi dengan TNI | Surat, Rapat dan Notulen Rapat | Bidang Perizinan dan kelembagaan | TNI |  |
|  |  | Surat edaran dan intruksi pimpinan | Surat pemberitahuan, surat Pernyataan Komitmen | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Seluruh dinas koperasi lokasi TMMD/N |  |
| 6 | Jumlah peserta sosialisasi bagi kelompok strategis | Surat edaran dan instruksi pimpinan | Surat Pernyataan Komitmen, SOP | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas Kop Kab/kota |  |
|  |  | Surat edaran dan instruksi pimpinan | Surat tindak lanjut rapat dengan TNI | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas Kop Kab/kota |  |
|  |  | Instruksi pimpinan | SOP pelaksanaan kegioatan | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Dinas Koperasi kab/kota |  |
|  |  | Koordinasi dengan OPD lain | Rapat rutin, telpon | Bidang Perizinan dan kelembagaan | Seluruh SKPD yang menjadi Pembina kelompok strategis |  |
| 7 | Peserta mampu menyusun dan menerapkan bisnis plan bagi koperasi yang dikelolanya | Intruksi pimpinan | Surat pemberitahuan dan permintaan peserta | UPTD | Dinas Kab/kota |  |
|  |  | Buku pedoman | Surat permintaan narasumber, dan bahan sosialisasi | UPTD | narasumber |  |
|  |  | Petunjuk teknis | Surat Tugas dan sertifikasi keahlian narasumber | UPTD | narasumber |  |
| 8 | Peserta mampu menerapkan system akuntansi dalam mengelola koperasi | Petunjuk teknis dan buku pedoman | Surat usulan peserta, narasumber | UPTD | Tim penyelenggara dan narasumber |  |
| 9 | Meningkatnya daya saing produk koperasi/KUD sector pertanian | Intruksi pimpinan | Surat pemberitahuan serta permintaan data peserta ke kab/kota | Kabid PK | Dinas Kab/kota |  |
|  |  | Intruksi pimpinan | Surat pemberitahuan serta permintaan data narsumber | Kabid PK | narasumber |  |
| 10 | Berkembangnya PUD dengan pendekatan OVOp melalui koperasi | Komitmen kepala daerah | SK penetapan PUD yang akan dikembangkan dan komitmen dengan kepala daerah | Kabid PK | Dinas kab/kota |  |
|  |  | Koordinasi dengan narasumber | Surat undangan dan sertifikasi keahlian narasumber | Kabid PK | narasumber |  |
|  |  | Komitmen dinas kab/Kota | Surat pembentukan tim pengembangan PUd di Kab/kota |  |  |  |
| 11 | Meningkatnya peluang pasar produk unggulan UMKm dan mendorong kader koperasi dikalangan generasi muda | Komitmen dengan oenyelenggara | Surat dari penyelenggara, surat ke Kab/kota dan rapat dengan UKM yang akan dibawa pameran | Kabid PK | Dinas Kab kota dan UKM |  |
| 12 | Meningkatkan kemampuan koperasi pengelola bantuan permodalan | Komitmen kepala daerah | Surat undangan ke kepala daerah, bahan expost, baliho di kab/kota serta pembentukan tim sosialisasi gema nagari ke Kab/kota | Kabid PK | Dinas Kab/kota damn |  |
|  |  | Komitmen kepala daerah dan kepala SKPD | Surat undangan ke kepala daerah, bahan expost, baliho di kab/kota serta pembentukan tim sosialisasi gema nagari ke Kab/kota | Kabid PK | Seluruh Dinas Kab/kota terkait gema nagari |  |
| 13 | Meningkatnya peran usaha simpan pinjam pola syariah | Komitmen dan koordinasi dengan kabid terkait | Surat undangan, bahan expost,laptop dan in fokus | Kabid PK | Dinas kab/kota |  |
| 14 | Jumlah usaha simpan pinjam yang dibina | Komitmen kepala daerah dan kepala SKPD | Surat undangan ke kepala daerah dan kepala SKPD, bahan expost, laptop, infokus | Kabid PK | Dinas kab/kota |  |
| 15 | Meningkatnya jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang mendapat pengawasan | Teguran dan sanksi tidak boleh menjalankan fungsi | Sosialisasi Permenkop ttg pengawasan ke dinas dan koperasi simpan pinjam | Kabid pengawasan | Kementrian dan dinas kop kab/kota |  |
| 16 | Meningkatnya jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | Komitmen dengan kepala daerah | Penggantian/mutasi yang sering terjadi didaerah, kepala daerah diminta komitmen untuk pengkaderisasian sebelum adanya mutasi | Kabid pengawasan | Dinas kab/kota |  |
| 17 | Meningkatnya pemahaman SDM UMKM tentang Merk dan sertifikasi halal | Petunjuk teknis syarat pengajuan merk dan halal | Rapat dan SOP kegiatan | Kabid PUK | Dinas Kab Kota |  |
|  |  | MoU dengan LPP POM | Rapat dan penambahan personil |  | LPP POM |  |
|  |  | Mou dengan haki | Rapat dan SOP |  | Dirjen haki |  |
| 18 | Tersedianya laporan capaian kinerja | Evaluasi terhadap kinerja masing masing bidang | Rapat bulanana | sekretaris | Kabid dan UPTD |  |
| 19 | Tercapainya penyusunan laporan kinerja keuangan | koordinasi dengan bakeuda |  |  |  |  |
|  |  | Evaluasi bertahap dengan bakeuda |  |  |  |  |
|  |  | Tindak lanjut oleh inspektorat |  |  |  |  |
| 20 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan data SKPD | Evaluasi berjenjang | Rapat bulanan, koordinasi dengan program dan keuangan | program | Eselon III dan IV lingkup diskop |  |

|  |
| --- |
| Mengetahui  **KEPALA DINAS KOPERASI UKM**  **PROVINSI SUMATERA BARAT**  **Ir Zirma Yusri**  **Pembina Utama Muda**  **NIP. 19600902 198503 1 004** |